

**STRATEGI PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN  
PETANI RUMPUT LAUT****Ernawati S.K**

Departemen of Agricultural Technology Education, Faculty of Engineering,  
Makassar State University  
e-mail: ernawatisyahruddin71@unm.ac.id

**ABSTRAK**

Kemiskinan yang disebabkan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir, merupakan masalah utama yang menjadi perhatian dari Pemerintah selama ini sehingga diperlukan strategi pemberdayaan untuk mengentaskannya. Untuk itu, tujuan artikel adalah untuk menggambarkan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut. Metode kajian menggunakan metode studi literatur dimana data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, kemudian membuat kesimpulan. Jenis data, yakni data sekunder. Teknik pengumpulan data, melalui tahapan pengambilan data dari pustaka, membaca, mencatat, kemudian mengolah data. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya *stakholder* melakukan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Melalui pendekatan dan strategi pemberdayaan tercipta iklim, penguatan daya, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai subyek pembangunan. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada asas berkelanjutan, azas konsisten, azas keterpaduan, azas kepastian hukum, azas kemitraan, azas pemerataan, azas peran serta, azas keterbukaan, azas akuntabilitas, dan azas keadilan. Pemberdayaan sebagai pendidikan non formal maka implementasi program pemberdayaan petani rumput laut dilakukan melalui proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penguatan kelompok, pendesiminasi teknologi budidaya rumput laut, dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada petani rumput laut di tingkat kelompok tani secara berkesinambungan.

**Kata Kunci:** Strategi, Pemberdayaan, Petani, Pendapatan, Kemandirian

**ABSTRACT**

Poverty caused by income inequality and social inequality that occurs in coastal communities is the main problem that has been of concern to the Government so far, so an empowerment strategy is needed to alleviate it. For this reason, the purpose of the article is to describe empowerment strategies to increase the income of seaweed farmers. The review method uses a literature study method where the data obtained are compiled, analyzed, then make conclusions. Type of data, namely secondary data. Data collection techniques, through the stages of taking data from the

library, reading, recording, then processing data. The results of the study show that stakeholder's efforts to carry out empowerment aim to increase community independence. Through empowerment approaches and strategies, climate is created, power strengthening, and protection of communities as subjects of development. The coastal community empowerment strategy carried out by the South Sulawesi Provincial Government is based on the principle of sustainability, the principle of consistency, the principle of integration, the principle of legal certainty, the principle of partnership, the principle of equity, the principle of participation, the principle of openness, the principle of accountability, and the principle of justice. Empowerment as non-formal education, the implementation of the seaweed farmer empowerment program is carried out through a learning process to improve knowledge and skills of group strengthening, dissemination of seaweed cultivation technology, and implementation of training and counseling to seaweed farmers at the farmer group level on an ongoing basis.

**Keywords:** Strategy, Empowerment, Farmer, Income, Independence

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan mendasar pada masyarakat pesisir, selalu mendapat perhatian utama dari Pemerintah terutama yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kawasan pesisir dan lautan tentu memiliki pula berbagai sumberdaya hayati yang sangat besar dan beragam. Untuk itu, berbagai sumberdaya hayati yang dimiliki di wilayah pesisir merupakan potensi pembangunan perairan yang sangat penting sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Salah satu sumberdaya hayati perairan tersebut adalah rumput laut (Rasyid, 2010).

Rumput laut merupakan sumberdaya alam hayati laut yang kaya akan manfaat karena dapat menghasilkan agar, karaginan dan alginat yang banyak digunakan dalam dunia industri makanan, minuman, farmasi dan industri non pangan. Dengan potensi sumber daya alam tersebut, tidak berlebihan jika rumput laut dijadikan salah satu andalan tidak hanya menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan untuk ikut membantu mempercepat terciptanya tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada khususnya. Lebih jauh lagi, pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya tertumpu pada pendekatan eksploitasi tetapi sudah lebih di arahkan kepada upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui budidaya tersebut.

Mengingat potensi produksinya yang sangat tinggi dan kemudahan dalam proses budidaya, sehingga sebagian masyarakat pesisir menjadi petani rumput laut, walaupun untuk mencapai produksi yang maksimal diperlukan beberapa faktor pendukung, diantaranya pemakain jenis

rumput laut yang bermutu, teknik budi daya yang intensif, pasca panen yang tepat dan kelancaran hasil produksi (Jana T. Anggadiredja, 1998). Beberapa faktor utama untuk menunjang pembudidayaan rumput laut, yakni pemilihan lokasi, sebagai salahsatu faktor keberhasilan budidaya rumput laut. Demikian lebih disebabkan relatif sulit untuk membuat perlakuan tertentu terhadap kondisi ekologi perairan laut yang selalu dinamis, sehingga besarnya hasil produksi rumput laut dibeberapa daerah sangat bervariasi.

Perubahan lingkungan yang fluktuatif terkadang menyebabkan munculnya hama dan penyakit yang berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Faktor perubahan musim dan faktor pengaruh pemanasan global juga mempengaruhi pola tanam rumput laut karena kualitas perairan menurun dan akibat gelombang tinggi berakibat kurang sesuai bagi pertumbuhan rumput laut. Hal ini berdampak pada tingkat pendapatan mereka sebagai rumput laut kadang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan terkadang juga tidak mencukupi jika harga jual hasil rumput laut relatif murah. Fluktuasi harga jual hasil rumput laut di pasaran mengakibatkan pendapatan dari penjualan hasil rumput laut yang diperoleh petani menjadi tak menentu.

Pembangunan sebagai proses belajar merupakan kunci bagi pembangunan yang tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh petani rumput laut terutama dalam hal peningkatan tenaga kerja yang produktif. Pengembangan sumberdaya manusia petani rumput laut tidak hanya membutuhkan sumber daya fisik, namun terimplementasi pada komunitas petani rumput laut yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai. Guna mengantisipasi tantangan era pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif saat ini, petani rumput laut dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dan keterikatan dan penggunaan sumberdaya yang tersedia. Sehingga mengakibatkan usaha tani rumput laut tidak lagi memberikan keuntungan yang layak bila hanya memperhatikan aspek budidaya saja, tetapi harus mencakup seluruh aspek dalam sistem agribisnis. Dengan demikian menuntut upaya petani rumput laut untuk mampu secara aktif memperjuangkan kepentingannya. Kemampuan petani tersebut sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap mental.

Pengetahuan dan pengertian tentang suatu program sampai pada seluk beluk pelakasanaanya sangat perlu bagi masyarakat pesisir khusunya petani rumput laut agar mereka dapat cepat tanggap terhadap kesempatan yang ada. Pengetahuan tentang adanya potensi lingkungannya yang dapat dikembangkan atau dibangun sangatlah penting. Besarnya potensi rumput laut Indonesia yang sangat menjanjikan dan dapat menjadi komoditi yang bisa berperan dalam pergerakan kemajuan ekonomi nasional. Sehingga Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen terbesar rumput laut jenis *Euchema Cotoni* dan menguasai 50% pangsa pasar dunia

untuk memenuhi permintaan pasar ekspor dari industri kosmetik dan farmasi. Walaupun produk rumput laut yang diekspor 80% masih dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) yaitu berupa rumput laut kering. Upaya pemasaran dan budidaya rumput laut yang cukup berkembang selama ini namun belum diimbangi dengan pengembangan pengolahan yang memadai. Hal ini terlihat dari hasil produksi rumput laut nasional baru sekitar 20% yang dapat terserap dan diolah oleh industri dalam negeri.

Budidaya rumput laut bukan hal baru bagi masyarakat pesisir Sulawesi Selatan. Beberapa daerah, seperti Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Bone, dan Takalar merupakan wilayah pengembangan budidaya rumput laut *Gracilaria* di Sulawesi Selatan dan sekaligus produsen rumput laut *Gracilaria* sejak tahun 1987. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit permasalahan yang dihadapi petani rumput selain permasalahan diatas , hal ini terlihat pada permasalahan budidaya dan non budidaya, seperti tingginya salinitas air laut, rendahnya kualitas dan kuantitas produksi rumput laut serta diperburuk dengan praktik budidaya yang tidak bertanggung jawab, dan tidak berjalannya mekanisme kelembagaan kelompok. Kondisi ini tentu akan berdampak pada petani rumput laut sebagai mata pencaharian karena harapan mereka dari budidaya rumput laut akan membawa keluarganya keluar dari ketimpangan dan kemiskinan. Faktanya hasil panen rumput laut dan penghasilan yang didapatkan petani yang tidak menentu. Demikian tentu akan berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga petani rumput laut.

Upaya pemberdayaan sangat perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya namun itu semua harus di dukung oleh *stackholder* yang benar-benar konsisten, disamping itu pula masyarakat harus bisa melaksanakan sesuai dengan di programkan, baik oleh LSM maupun pemerintah. Kemauan dan keinginan untuk perubahan terhadap kehidupan sosial dan ekonominya, sehingga strategi pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut perlu diketahui dan dampaknya tentu pada meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga petani rumput laut. Untuk itu, artikel ini akan menggambarkan strategi pemberdayaan pemberdayaan petani rumput laut untuk meningkatkan pendapatan di Sulawesi Selatan.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang strategi dan pendekatan masyarakat pesisir dan pelaksanaan pemberdayaan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga petani rumput laut di Sulawesi Selatan. Sumber

dan metode pengumpulan data, yakni dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel hasil penelitian tentang konsep yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan lainnya yang relevan dengan penelitian. Analisis data dimulai dengan menganalisis hasil penelitian dari yang paling relevan, relevan dan cukup relevan. Selanjutnya mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil kompilasi kemudian dianalisis, dan ditarik kesimpulan (Mardalis, 1999).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpektif Konseptual**

#### **1. Makna Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dalam pandangan Abu Huraerah, bahwa memiliki dua pengertian mendasar, yakni peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber daya di dalam masyarakat (Abu Huraerah, 2008). Kemudian dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap lingkungan dan pemberian informasi kepada masyarakat secara terus menerus yang berkaitan dengan masalah sosial dan usaha-usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk itu, menurut Adisasmita (2006) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari: (1) Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi), (2) Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan), (3) Aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas dan efisiensi).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2015 mengatakan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berarti pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sehingga segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi dimana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan

dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat.

### 2. Pendekatan dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan menurut Gunawan S. (1999), bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

- a. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penangannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dapat dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Berdasarkan pendapat ahli tentang pemberdayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi sumber daya yang ada di masyarakat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri.

Kemudian dalam pandangan Wijaya (2002), mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi sehingga individu atau masyarakat menjadi mandiri (Suryana (2010).

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan,

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Suryana (2010). Berarti tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang mandiri.

### 3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan cara, metode yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sunyoto Usman (2004: 40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Strategi pemberdayaan masyarakat secara umum, ada empat dalam rangka strategi pengembangan masyarakat, yaitu:

- a. *The Growth Strategy*, Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekosistem, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan.
- b. *The Welfare Strategy*, Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam arti masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduksi dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang sedemikian inilah dakwah dengan model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.
- c. *The Responsive Strategy*, Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan .
- d. *The Integrated or Holistic Strategy*, Untuk mengatasi dilema pemberdayaan masyarakat karena kegagalan dari ketiga strategi yang dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dari

unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif strategi pemberdayaan (Halim, 2001).

Menurut Richard C Rick (Friedman, 1992) Proses pengangkatan martabat manusia dengan konsep pemberdayaan sebagai pilihan, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) *Formal empowerment*, pemberdayaan terhadap institusi pemerintah dalam menyediakan mekanisme untuk publik dalam mempengaruhi keputusan-keputusan terkait, akan berpengaruh pada institusi lokal dan masyarakat dalam beberapa hal bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
  - 2) *Interpersonal empowerment*, menyangkut kemampuan personal dalam menghadapi berbagai situasi.
  - 3) *Instrumental empowerment*, menanamkan dan memberikan fasilitas actual bagi individu untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan.
  - 4) *Substantive empowerment*, menanamkan kemampuan untuk menerapkan keputusan-keputusan yang bersifat *problem solving* atau produksi hasil yang diharapkan.
4. Komponen Pemberdayaan

Komponen pokok yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat (Nugroho, 2014), sebagai berikut:

- a.) Penelitian untuk penggalian data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan rencana strategis (*strategic plan*) sesuai kebutuhan (*needs*). Metodologi yang dapat digunakan antara lain *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu pendekatan dan teknik-teknik keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat, *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), *Participatory Action Research* (PAR), *Participatory Rapid Community Appraisal* (PARCA), *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark* (*Baseline Study*).
- b.) Pelatihan dengan fokus pengembangan kapasitas (*capacity building*) terhadap target pemberdayaan.
- c.) Kerjasama dan inovasi : Pelatihan akan berjalan efektif apabila dilengkapi jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepakaran dan komitmen, serta mengandung muatan inovasi spesifik lokasi. Sinkronisasi semua komponen tersebut diwujudkan dari hasil penelitian.
- d.) Pemangku kepentingan dan tenaga pendamping ini seyogyanya gabungan dari petugas instansi pemerintah dan unsur LSM yang tinggal dan kontak langsung dengan masyarakat dalam rangka fasilitasi diskusi dan implementasi pemberdayaan. Disamping itu, tenaga

pendamping juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program pemberdayaan.

- e.) Pengawasan dan evaluasi merupakan masukan untuk modifikasi dan penyempurnaan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Semua komponen tersebut diimplementasikan dalam konsepsi “partisipatif”.

## **B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan**

Masyarakat pesisir adalah orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari : nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan/organism laut lainnya, pedagang ikan, pengelola ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Di bidang non perikanan, terdiri dari : penjual jasa pariwisata bahari/pesisir, penjual jasa transportasi laut, kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya non hayati laut dan pesisir untuk kehidupannya (kumpulan pendapat dari jurnal yang disimpulkan).

Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang bagi masyarakat pesisir agar dapat melakukan mobilitas vertikal, paling tidak ada empat jalan yang bisa ditempuh : Pertama, dengan cara mendorong pergeseran status nelayan tradisional menjadi nelayan modern. Kedua, dengan cara tetap membiarkan nelayan tradisional dalam status “tradisional”, tetapi memfasilitasi mereka agar memiliki kemampuan penyangga ekonomi keluarga yang kenyal terhadap tekanan krisis. Ketiga, memberi pendidikan dan keterampilan bagi generasi muda, agar memiliki usaha yang dikembangkan perlu sentuhan keagamaan, agar masyarakat di daerah pesisir memiliki pengalaman dan pengamalan ajaran agama yang lebih baik (Ibadurahman, 2015:25).

Berdasarkan Peraturan Daerah Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Selatan BAB III Pasal 4 tahun 2017, pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan tujuan:

- a. Menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir guna menjamin pemanfaatan secara rasional, dan berkelanjutan.
- b. Menciptakan pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melindungi wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar wilayah provinsi.
- d. Memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

- e. Meningkatkan kepasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) pedalaman merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu lepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan sebagai suatu konsep merupakan paradigma (Chambers, 1995). Sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar fisik tetapi juga kebutuhan non-fisik. Kemiskinan tidak hanya ekonomi tetapi juga menyangkut kemiskinan sosial, budaya, politik dan hak asasi. Namun kemiskinan sosial ekonomi memang yang terburuk karena sebagai ketidakberdayaan suatu keadaan kejiwaan masyarakat yang dalam keadaan putus asa, tidak berdaya sebagai rasa tidak percaya diri, dan kenistaan (Thomas.R, Dye 1990).

Pengentasan kemiskinan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari partisipasi dan rasa percaya diri masyarakat. Dalam kebijakan pembangunan, pemerintah harus berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat desa tidak saja dipandang sebagai pengguna jasa pelayanan tetapi sebagai warga Negara yang aktif (Wahab, 2002). Masyarakat secara aktif bermakna bahwa pembuatan suatu kebijakan pembangunan. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan, sehingga pemberdayaan masyarakat pedesaan sangat penting.

Konsep perencanaan yang berpusat pada masyarakat akan mempercepat terhadap usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Ketergantungan masyarakat yang besar mengakibatkan *people centered* sebagai konsep menjadi pilihan, karena dapat memberikan kebebasan, kemandirian dan kreativitas secara murni serta mampu menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya lokal yang tersedia. Sumber daya lokal yang harus digali implikasinya pada tumbuhnya managemen pembangunan baru yang dikenal dengan pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resource management*). Manajemen baru tadi telah mengubah peranan birokrasi pemerintah dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk masyarakat, menjadi terciptanya kondisi yang menimbulkan kemampuan bagi masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri (Korten, 1984).

Strategi pemerintah dalam pemberdayaan dan pemanfaatan wilayah pesisir (Perda Sulawesi Selatan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir) harus berdasarkan beberapa asas:

- 1) Asas berkelanjutan:
  - a) Pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju pertumbuhan kembali sumbedaya non-hayati pesisir.

- b) Pemanfaatan sumberdaya pesisir pada saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir.
  - c) Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadahi.
- 2) Asas konsisten merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintah, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang telah terakreditasi.
- 3) Asas keterpaduan dikembangkan dengan:
- a) Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintah secara horizontal dan vertical antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
  - b) Keterpaduan antara ekosistem darat dan laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengelolaan wilayah pesisir.
- 4) Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.
- 5) Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
- 6) Asas pemerataan adalah manfaat ekonomi sumbedaya yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.
- 7) Asas peran serta masyarakat yaitu :
- a) Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
  - b) Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir.
  - c) Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
  - d) Memfaatkan sumbedaya pesisir secara adil.
- 8) Asas keterbukaan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia, golongan dan rahasia Negara.
- 9) Asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 10) Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Menurut Suhendra (2006) terdapat beberapa indikator masyarakat yang berdaya, antara lain: (1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, (2) Dapat berjalan *bottom up planning*, (3) Kemampuan dan aktivitas ekonomi, (4) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, (5) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Oleh karena itu, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

### **C. Implementasi Program Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Sulawesi Selatan**

Rumput laut atau *sea weed* yang di budidayakan petani selama ini adalah tumbuhan sederhana yang tidak memiliki akar, batang dan daun sejati sebagaimana pada tumbuhan tingkat tinggi. Seluruh bagian tubuhnya disebut *thallus* (Winarno, 1996). Jika dilihat secara sepintas, tumbuhan ini berbentuk rumpun, dengan tipe percabangan tidak teratur, '*dichotomous*', '*alternate*', '*pinnate*', ataupun percabangan yang lain (Sjafrie, 1990).

Dalam rangka pemberdayaan petani rumput laut, strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani di Sulawesi Selatan selama ini adalah sebagai berikut: (1) Membentuk kelompok dan penguatan kelompok yang sudah ada; (2) Mendesiminasiakan teknologi budidaya rumput laut; dan (3) Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani secara berkesinambungan

Penguatan dan pembentukan kelompok dilakukan agar kelompok tani rumput dapat menjadi suatu organisasi dengan majajemen yang lebih baik sehingga anggotanya dapat mengakses modal kerja usaha tani ke lembaga-lembaga perbankan yang ada di setiap daerah. Melalui pelatihan para petani yang tergabung dalam kelompok tani rumput laut diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang tujuan dan manfaat berkelompok, manajemen organisasi bagi pengurus kelompok, dan cara mengakses modal usaha tani ke perbankan.

Adapun dalam hal alih teknologi budidaya dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan, para petani rumput laut diberikan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan sebagai berikut:

1. Kualitas rumput laut: melalui pelatihan para petani rumput laut diberi pengetahuan dan keterampilan kualitas rumput laut dengan melihat dari hasil dari rendemen, kadar air dan kadar abu.
  - Rendemen: merupakan persentase agar yang dihasilkan dari rumput laut kering. Rendemen telah menjadi salah satu parameter penting dalam menilai efektif tidaknya proses pembuatan tepung agar. Karena rendemen agar dipengaruhi oleh jenis rumput

laut, iklim, metode ekstraksi, waktu panen dan lokasi budidaya. Hal ini tentu dengan persentase yang berbeda jika dibudidayakan di tambak dan hasil budidaya di laut.

- Kadar air: melalui pelatihan dan penyuluhan petani diberikan pengetahuan tentang kandungan air yang terdapat pada rumput laut. Kadar air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya tahan suatu bahan yang menunjukkan kestabilan serta indeks mutu rumput laut.
  - Kadar abu: melalui pelatihan dan penyuluhan petani diberikan pengetahuan tentang kadar abu yang dapat menunjukkan besarnya kandungan mineral pada rumput laut kering yang tidak terbakar selama pembakaran atau pengabuan. Sebab kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan.
2. Salinitas: melalui pelatihan para petani rumput laut diberi pengetahuan dan keterampilan mengukur salinitas dan rentang salinitas air yang cocok untuk jenis rumput laut yang dibudidayakan. Termasuk kesesuaian faktor fisika dan kimia perairan seperti gerakan air, suhu, kadar garam, nutrisi atau zat hara seperti nitrat, fosfat dan pencahayaan sinar matahari.
  3. Nilai ekonomis rumput laut: melalui pelatihan para petani rumput laut diberi pengetahuan nilai ekonomis rumput laut untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan pada industri, makanan, tekstil, kertas, cat, kosmetika, dan farmasi (obat-obatan). Kemudian dalam bidang bioteknologi agar sebagai hasil produkrumput laut juga banyak dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan mikroba, yeast, mikroalga, elektroforesis dan rekombinasi DNA (Suparmi dan Sahri, 2009).
  4. Jenis Metode Budidaya Rumput Laut: melalui pelatihan para petani rumput laut diberi pengetahuan dan keterampilan beberapa jenis metode budidaya rumput laut di Indonesia menurut KKP (2008), seperti:
    - Metode Dasar  
Metode dasar merupakan cara budidaya rumput laut yang paling sederhana, dilakukan dengan cara menebarkan potongan-potongan rumput laut yang akan ditanam pada dasar perairan yang tenang, bibit-bibit rumput laut yang akan ditanam sebelumnya dipotong-potong terlebih dahulu selanjutnya diikat pada batu-batu kecil, agar dapat tenggelam dan menempel pada dasar perairan dan tidak hanyut dibawa arus.
    - Metode Lepas Dasar  
Dasar perairan yang berpasir atau lumpur berpasir sangat cocok dengan metode ini karena dilakukan untuk memudahkan penancapan patok/pancang, apabila dasar perairan terdiri dari batu karang maka akan sulit dalam penancapan tiang. Cara pelaksanaan metode lepas dasar yaitu menancapkan tonggak atau patok dari bambu

atau kayu dengan jarak antara patok untuk merentangkan tali ris sekitar 2,5 cm. Dalam metode ini bibit-bibit rumput laut diikatkan pada tali atau jaring yang direntangkan mendatar di atas dasar perairan yang diperkirakan pada saat surut terendah masih terendam air (jarak dari dasar perairan sekitar 30 cm).

- **Metode Rakit Apung**

Metode rakit apung merupakan metode budidaya rumput laut yang cocok digunakan pada perairan yang pergerakan airnya didominasi oleh ombak seperti daerah berkarang. Bibit rumput laut diikatkan pada tali ris yang terletak pada rakit sehingga selalu mengapung. Penanaman dilakukan dengan menggunakan rakit dari bambu. Jangkar digunakan untuk menahan rakit agar tidak hanyut terbawa oleh arus.

- **Metode Apung dengan Jaring**

Metode ini hampir sama dengan metode rakit tetapi ada penambahan dengan memakai jaring pada bagian bawahnya, hal ini bertujuan menghindari apabila rumput laut patah dan patahnya tidak jatuh ke bawah dan masih tertahan di atas jaring, sehingga produksi dapat lebih tinggi dari pada metode apung biasa. Metode ini biasanya dipakai pada daerah yang berombak dan berarus kuat. Cara penanaman metode ini yaitu dengan mengikat bibit langsung pada jaringnya tidak pada tali, tali hanya dipakai dua buah pada tengahnya untuk menahan jaring apabila rumput laut sudah bertambah besar sehingga jaring tidak akan turun ke bawah.

- **Metode Longline**

Metode longline merupakan salah satu metode penanaman rumput laut yang menggunakan tali polyetilen sebagai tempat mengikat rumput laut, tambang dan jangkar sebagai pijakan pada dasar perairan, serta pelampung pada tali. Selain itu, keuntungan dari metode ini adalah rumput laut terbebas dari hama bulu babi, pertumbuhannya lebih cepat dan lebih murah ongkos materialnya.

## **KESIMPULAN**

Upaya *stakholder* melakukan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga masyarakat mandiri dan sejahtera. Melalui pendekatan dan strategi pemberdayaan maka masyarakat menjadi subyek pembangunan sehingga tercipta iklim, penguatan daya/aset, dan perlindungan terhadap masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada beberapa azas, seperti azas berkelanjutan, azas konsisten, azas keterpaduan, azas kepastian hukum, azas kemitraan, azas pemerataan, azas peran serta, azas keterbukaan, azas akuntabilitas, dan azas keadilan.

Pemberdayaan sebagai pendidikan non formal maka implementasi program pemberdayaan petani rumput laut dilakukan melalui proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penguatan kelompok, pendesiminasi teknologi budidaya rumput laut, dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada petani rumput laut di tingkat kelompok tani secara berkesinambungan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggadiredja J. 1998. Seaweed Diversity on the Warambali Seashore of Sumba Island and its utilization. Master Degree Thesis University Indonesia
- Friedrman, J. 1992. Empowerment: *The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Cambridge, USA.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung : Humaniora.
- Ibadurrahman. 2015. Strategi Pemberdayaan Kehidupan Ekonomi Petani Rumput Laut Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Tesis*. UNM.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2008. Teknologi Budidaya Rumput Laut Eucheumacottoni. Balai Budidaya Laut Ambon. Ambon.
- Korten, David C. 1984. *People-Centred Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, USA.
- Mardalis. (1989). Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. *Bumi Aksara*, Vol 26.
- Nugroho, Prayono. 2014. Komponen Pemberdayaan. (*Online*), Vol 7, (Diakses 20 Desember 2019)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sjafrie, N. D. M. 1990. Beberapa catatan mengenai rumput laut Gracilaria. Oseana, Vol. 15 (4) : 147-155.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Suparmi dan Sahri, A. 2009. Mengenal potensi rumput laut: Kajian pemanfaatan sumberdaya rumput laut dari aspek industry dan kesehatan. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 54 (118) :95-116
- Suryana, Sawa. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Negeri Semarang

Rasyid, A. 2010. Ekstraksi Natrium Alginat Dari Alga Coklat *Sargassum Echinocarpum*, Pusat Penelitian Oseanografi- LIPI. Jakarta. Jurnal nasiona

Thomas R. Dye. 1990. *American Federalism: Competition Among Governments*. Lexington Books.

Usman Sunyoto. 2004. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

UU Nomor 25 Tahun 2000 PROPERAS

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, F. G., 1996. Teknologi Pengolahan Rumput Laut. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.